

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2023**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	8
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	9
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara.	9
B. Tugas Pokok.	9
C. Fungsi.	9
D. Manajemen Kepaniteraan.	10
Struktur Organisasi.	10
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.	11
E. Manajemen Kesekretariatan	17
1. Struktur Organisasi.	17
2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan.	18
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi.	32
A. Kesimpulan.	32
B. Rekomendasi.	32
LAMPIRAN	33
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01.	34
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05.	36
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNPB DIPA 005.01.	39
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNPB DIPA 005.05.	42
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6).	45

	DAFTAR TABEL	Hal
Tabel 1.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua.	5
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	6
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	6
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	6
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	7
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	7
Tabel 7.	Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	7
Tabel 8.	Laporan Keadaan Perkara Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 9.	Laporan Jenis Perkara Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	12
Tabel 10.	Keadaan Keuangan Perkara Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 11.	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	13
Tabel 12.	Biaya Eksekusi s.d Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 13.	Buku Register Meja Informasi Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	15
Tabel 14.	Buku Register Pelayanan Posbakum bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 15.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18
Tabel 16.	Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18

Tabel 17.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan November 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 18.	Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan November 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 19.	Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 20.	Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 21.	Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	20
Tabel 22.	Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	20
Tabel 23.	Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	22
Tabel 24.	Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	25
Tabel 25.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 26.	Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 27.	Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi Lainnya	28
Tabel 28.	Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	28
Tabel 29.	Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	29
Tabel 30.	Rekapitulasi kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan Oktober secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas

3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/2538/HK.00.08/XII/2019 Tentang Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrau	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 14 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009

8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – 2023
14	JUSAK SINDAR, S.H	Periode 2023 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Mekanisme penyusunan laporan ini memanfaatkan aplikasi Sistem SIPACE yang dikembangkan oleh Pranata Komputer Tingkat Pertama. Adapun sistematika penyajian laporan ini dapat diuraikan antara lain :

Bab I. Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan lingkup pekerjaan dan manfaat dokumen laporan bulanan dengan keterkaitannya terhadap laporan

Bab II. Menguraikan pelaksanaan kedudukan, tugas pokok dan fungsi pada bulan berkenaan.

Bab III. Penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

D. Manajemen Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipimpin oleh Panitera, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

1. Struktur Organisasi Kepaniteraan

Struktur organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan

Pada bab VI tentang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A terdiri atas:

a. Kepaniteraan Muda Perkara; Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 3) pelaksanaan penelitian administrasi gugatan/sengketa tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan penyerahan berkas perkara gugatan/sengketa tata usaha negara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Panitera untuk ditetapkan apakah perkara tersebut dismissal atau tidak, jika tidak akan ditetapkan atau ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa.
- 5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak;
- 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
- 9) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan November 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 8. Laporan Keadaan Perkara Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PERKARA	SISA BLN	MASUK	PUTUS	SISA	KETERANGAN			
		LALU	BLN INI	BLN INI	SD BLN INI	CABUT	GUGUR	PLW	DISMISAL
1	Gugatan	13	3	6	10	-	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan November Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Jenis Perkara Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JENIS PERKARA	SISA BLN LALU	BULAN INI	S/D BLN INI
1	Pertanahan	5	3	8
2	Kepegawaian	3	-	3
3	Perijinan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	1	-	1
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Tindakan Faktual	-	-	-
18	Merek	-	-	-
19	Lain-lain	4	-	4
Total		13	3	16

1.3. Keadaan Keuangan Perkara Bulan November 2023

Tabel 10. Keadaan Keuangan Perkara Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	32,831,000	-	-	32,831,000
2	Penerimaan	-	69,416,000	-	69,416,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	375,000	375,000
4	Biaya Panggilan	-	-	214,000	214,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	363,000	363,000
6	Biaya Pemeriksaan setempat	-	-	42,000,000	42,000,000
7	Biaya Pemberkasan dan Pengiriman Berkas	-	-	1,630,000	1,630,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	-	-
9	Materai	-	-	80,000	80,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	290,000	290,000
	b. Redaksi	-	-	80,000	80,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	976,000	976,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	1,937,000	1,937,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
13	Biaya Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	32,831,000	69,416,000	47,945,000	54,302,000

1.4. Biaya proses/ATK/Pemberkasan s.d Bulan November 2023

Tabel 11. Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	12,226,500	-	-	12,226,500
2	Penerimaan	-	375,000	-	375,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	3,726,000	3,726,000
	Jumlah	12,226,500	375,000	3,726,000	8,875,000

1.5. Biaya Eksekusi s.d Bulan November 2023

Tabel 12. Biaya Eksekusi s.d Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	2,277,000	-	-	2,277,000
2	Penerimaan	-	-	-	-
3	Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
4	Materai	-	-	10,000	10,000
5	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
6	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	29,000	29,000
7	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	10,000	10,000
8	Surat Pemberitahuan kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
9	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
10	Pengembalian Sisa Panjar	-	-	707,000	707,000
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	2,277,000	-	756,000	1,521,000

1.6. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 5.0.0. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan Oktober Tahun 2023 adalah 75,51%. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

b. Kepaniteraan Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

- f. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada bulan November 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah diperbarui dengan SK KMA No. 1-144KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/110/HM.02.3/I/2023 tentang Pengelola Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/109/HM.02.3/I/2023 tentang Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 13. Buku Register Meja Informasi Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	PEMOHON	TGL DITERIMA	OBYEK PEMOHON	TINDAK LANJUT
1	Jemmy Richard Yap	20/11/2023	Salinan Putusan Perkara	Mendapat Salinan Putusan
2	Steven Fakdawer	4/11/2023	Salinan putusan Perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
3	Dyah Margo Mukti	27/11/2023	Rincian Informasi Perkara Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.JPR	Mendapat Informasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Bulan ini tidak terdapat Pengaduan yang terdaftar pada buku register Bulan November 2023.

2. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 14. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	PEMOHON	JENIS JASA	JUMLAH JAM LAYANAN	KET
1	Hendrik Yan Tanen	Konsultasi Hukum Terkait Pemohonan Ahli Waris	1 Jam	-
2	Thomas A Bano	Konsultasi Hukum Terkait Tanah Adat Dibangun Kantor PLN Tanpa Ada Izin Dari Masyarakat Yang Punya Tanah	1 Jam	-
3	Fiona Herlin De Fretes	Konsultasi Hukum Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1 Jam	-
4	Maria Maia D Belo	Konsultasi Hukum Terkait Gugatan cerai Dari Suami Tom Darus Rumsowk	1 Jam	-
5	Beni Hesegem	Konsultasi Terkait Pilkada	1 Jam	-
6	Turan Tengko	Konsultasi Terkait Pertanahan	1 Jam	-
7	Delia Yarisitow	Konsultasi terkait Penambahan Marga	1 Jam	-
8	Mariana Karobaba	Konsultasi Terkait Pemohonan Ahli Waris	1 Jam	-
9	Labuan Hurabarat	Konsultasi Terkait Kepegawaian	1 Jam	-
10	Yoob Ginia	Konsultasi Terkait Kredit Bank Papua Sudah Lunas Tapi Belum Dikasih Sertifikat Jaminannya	1 Jam	-
11	Alfares Y K Mara	Konsultasi Perbaikan Nama pada Akta Pencatatan Sipil	1 Jam	-

3. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum.

Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

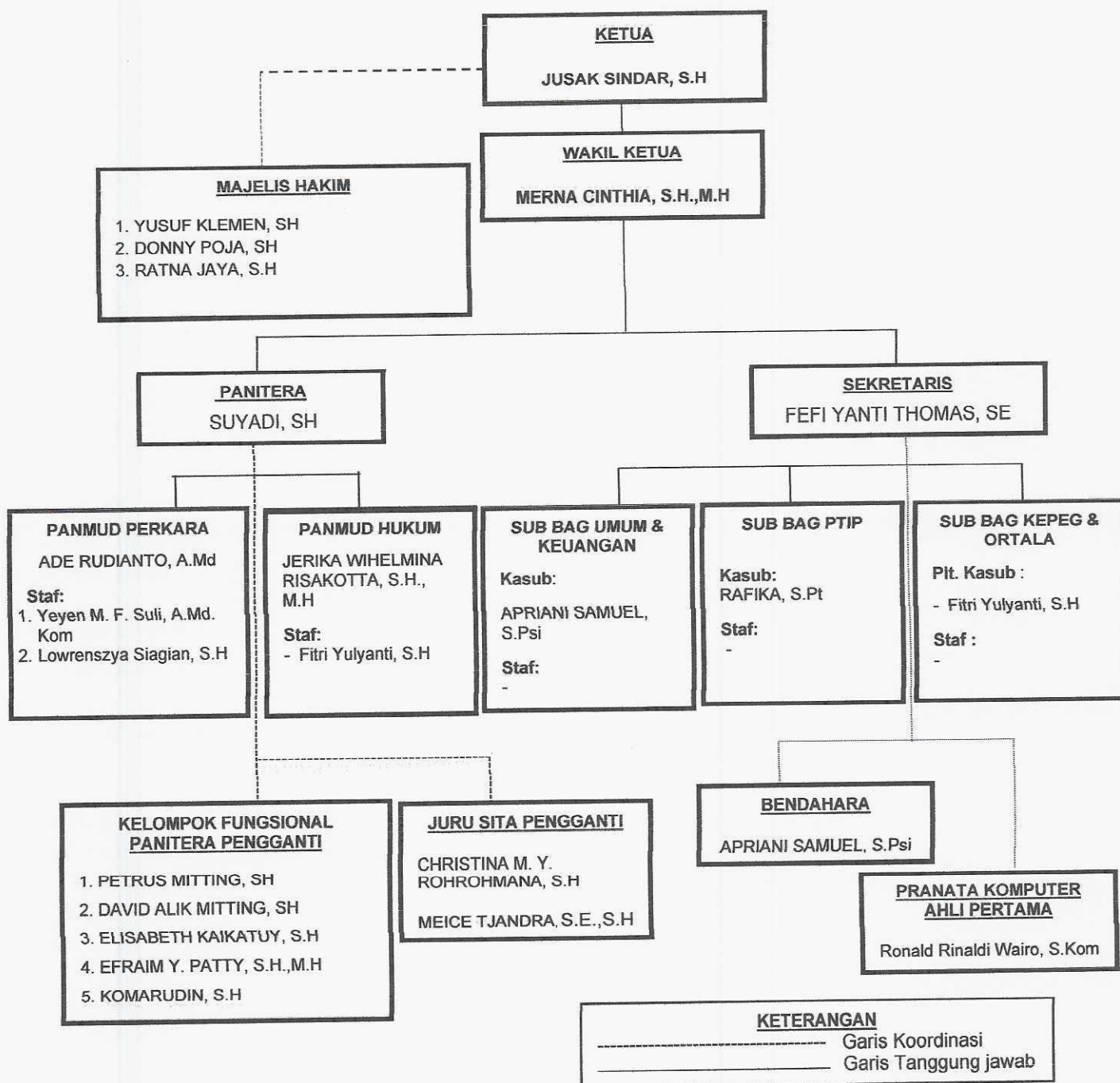
Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

E. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada peradilan dibawahnya. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
(Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan

Sebagaimana tersebut pada Bab XI Bagian Ketiga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

1) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Saat ini Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan tidak adanya staf. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran.

Untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan November 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 01 PTUN Jayapura Tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023.

Tabel 15. Pagu Anggaran DIPA 005.01 sampai Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	3,861,241,000
Belanja Barang	1.940.510.000
Belanja Modal	1.088.433.000
Total	6.890.184.000

- ❖ Pagu Anggaran DIPA 05 PTUN Jayapura Tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023

Tabel 16. Pagu Anggaran DIPA 005.05 sampai Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Pengamanan Sidang	12.000.000
Pos Bantuan Hukum	32.900.000
Prodeo	1.400.000
Total	46.300.000

b. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan November 2023

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.01)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	3.861.241.000	259.563.118	3.302.642.430	558.598.570
2	Barang	1.937.214.000	123.009.747	1.752.547.575	184.666.425
3	Barang Non Operasional	3.296.000	0	2.980.000	316.000
4	Modal	1.088.433.000	447.772.000	586.954.000	501.469.000

Laporan Realisasi Anggaran Dipa 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 18. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	BELANJA	DIPA (005.05)	REALISASI		SISA
			BULAN INI	S/D BLN INI	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	46.300.000	4.400.000	38.056.700	8.243.300
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

1) Laporan PNPB

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan November Tahun 2023 secara umum sebagai berikut:

Tabel 19. Realisasi Penerimaan PNBPN Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	AKUN	JENIS PENDAPATAN	BLN INI	SD BLN INI
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4.295.124	27.153.362
2	425232	Uang Meja (Leges)	160.000	1.470.000
3	425233	Ongkos Perkara	320.000	3.140.000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.377.500	15.550.500
		Total	6.152.624	47.731.862

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 1444 m2, halaman gedung 2780 m2 dan pagar 222 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 20. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	TYPE	TAHUN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN
1	B	1992	700 m2	200 m2
2	B	1992	700 m2	150 m2
3	C	1992	1100 m2	120 m2
4	C	1992	1100 m2	120 m2
5	C	1992	1100 m2	120 m2
6	C	1992	1100 m2	120 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	TYPE	LUAS TANAH	NO.SK	PENGGUNA	JABATAN
1	B	700 M2	W8-TUN3/70/PL.01/II/2023	Jusak Sindar, S.H	Ketua
2	B	700 M2	W8-TUN3/839/PL.01/VIII/2023	Merna Cinthia, S.H., M.H	Wakil ketua
3	C	1100 M2	W8-TUN3/720/PL.01/VII/2023	Ratna Jaya, S.H	Hakim
4	C	1100 M2	W8-TUN3/697/PL.01/VI/2023	Donny Poja, S.H	Hakim

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

Tabel 22. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA ASET	TAHUN	NO. PLAT	KONDISI	N0.SK	PENGGUNA	JABATAN	KET
1	Toyota Innova	2012	PA 60	Baik	W8-TUN3/387/PL.06/II/2023	JUSAK SINDAR, S.H	KETUA	
2	Toyota Vios	2006	PA 1988 DZ	Baik	W8-TUN3/504/PL.06/II/2023	MERNA CINTHIA, S.H., M.H	WAKIL KETUA	
3	Toyota Innova	2011	PA 1810 DZ	Baik	W8-TUN3/82/PL.06/II/2023	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	
4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	PA 1689 DZ	Baik	W8-TUN3/88/PL.06/II/2023	SUYADI, SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 1697 DZ	Baik	W8-TUN3/86/PL.06/II/2023	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	W8-TUN3/905/PL.06/VI/2023	MEICE TJANDRA, S.H.,M.H	JURU SITA PENGGANTI	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	-	-	-	-	TGR
8	Honda	2011	PA 4396 DZ	Baik	W8-TUN3/1140/PL.06/XI/2023	DAVID.ALIK MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
9	Honda	2008	PA 4517 DZ	Baik	W8-TUN3/100/PL.06/II/2023	DEDY W. NUGRAHA, A.Md	Pengelola BMN	PENGELOLA KEUANGAN
10	Honda	2008	DS 4301 DZ	Baik	W8-TUN3/92/PL.06/II/2023	MARTA DANGKUNG	KASUB.KEPG & ORTALA	
11	Honda	2008	PA 4743 DZ	Baik	W8-TUN3/98/PL.06/II/2023	RONALD RINALDI WAIRO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER	
12	Honda	2005	PA 4732 DZ	Baik	W8-TUN3/90/PL.06/II/2023	PETRUS MITTING, SH	PANITERA PENGGANTI	
13	Honda	2009	PA 4658 DZ	Baik	W8-TUN3/108/PL.06/II/2023	KOMARUDIN, SH	PANITERA PENGGANTI	
14	Honda	2009	PA 4372 DZ	Baik	W8-TUN3/104/PL.06/II/2023	ELIZABETH KAIKATUY, SH	PANITERA PENGGANTI	
15	Honda	2005	PA 4290 DZ	Baik	W8-TUN3/110/PL.06/II/2023	CHRISTINA.M.Y. ROHROHMANA, S.H	ANALIS PERKARA PERADILAN	BENDAHARA PENERIMAAN
16	Honda	2007	PA 4518 DZ	Baik	W8-TUN3/94/PL.06/II/2023	ADE RUDianto. A.Md	PANITERA MUDA PERKARA	
17	Honda	2011	PA 4132 DZ	Baik	W8-TUN3/102/PL.06/II/2023	EFRIM Y. PATTY	PANITERA PENGGANTI	
18	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	W8-TUN3/96/PL.06/II/2023	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
19	Honda	2007	PA 3473 DZ	Baik	W8-TUN3/106/PL.06/II/2023	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 23. Keadaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA BARANG MILIK NEGARA	STATUS			Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	-	-	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	-	
3	Sedan	1	-	-	
4	Mini Bus	3	-	1	
5	Sepeda Motor	13	-	2	
6	Kursi Roda	1	-	-	
7	Cermin	2	-	3	
8	Rak-rak Penyimpan	14	1	3	
9	Lemari Besi	3	-	7	
10	Lemari Kayu	30	6	8	
11	Brankas	2	-	-	
12	CCTV	1	-	-	
13	Papan Visual/Papan Nama	6	-	11	
14	White Board	1	-	1	
15	LCD Projektor	1	-	-	
16	Alat Kantor Lainnya	1	-	3	
17	Meja Kerja Kayu	57	14	50	
18	Kursi Besi	29	4	44	
19	Kursi Kayu	20	31	41	
20	Sice	5	3	12	
21	Bangku Panjang Kayu	20	7	7	
22	Sketsel	2	-	-	
23	Kursi Fiber Glass	23	33	14	
24	AC Split	21	-	15	
25	Mixer	2	-	1	
26	Televisi	3	-	6	
27	Amplifire	2	1	-	
28	Loudspeaker	6	-	8	
29	Tiang Bendera	4	1	1	
30	Kaca Hias	1	-	1	
31	Palu Sidang	2	-	1	
32	Lambang Instansi	1	-	-	
33	Handycam	1	-	-	Dalam proses penghapusan
34	Audio Mixing Console	1	-	-	
35	Microphone/Wireless Mic	6	-	2	
36	UPS	7	-	-	
37	Microphone cable	11	-	-	
38	Camera Conference	1	-	-	
39	Genset	1	-	-	
40	Walker Polding	2	-	-	
41	Komputer jaringan lainnya	3	-	-	
42	PC	25	4	13	
43	Laptop	8			

44	Notebook	9	6	5	
45	Printer	6	6	16	
46	scanner	1	-	2	
47	server	1	-	1	
48	router	1	-	1	
49	Rak server	1	-	-	
50	Bangunan Gedung kantor permanen	1	-	-	
51	Rumah negara golongan I tipe B permanen	2	-	-	
52	Rumah negara golongan I tipe C permanen	4	-	-	
53	Pagar permanen	1	-	-	
54	Referensi	18	-	-	
55	Papan pengumuman	-	1	-	
56	Meja komputer	-	1	3	
57	Meja Resepsionis	-	1	1	
58	Compact disk player	-	1	-	
59	Alat tenis meja	-	1	1	Dalam proses penghapusan
60	Lemari Penyimpan	-	-	3	Dalam proses penghapusan
61	Mesin ketik manual standar	-	-	3	Dalam proses penghapusan
62	Mesin Ketik manual Langewagon	-	-	2	Dalam proses penghapusan
63	Rak kayu	-	-	1	Dalam proses penghapusan
64	Filling Cabinet besi	-	-	12	Dalam proses penghapusan
65	Tempat tidur besi	-	-	1	Dalam proses penghapusan
66	Tempat tidur kayu	-	-	3	Dalam proses penghapusan
67	Meja telepon	-	-	1	Dalam proses penghapusan
68	Kasur/spring bed	-	-	7	Dalam proses penghapusan
69	Meja makan kayu	-	-	1	Dalam proses penghapusan
70	Perkakas kantor lainnya			1	Dalam proses penghapusan
71	Pot bunga	-	-	6	Dalam proses penghapusan
72	Jam elektronik	-	-	10	Dalam proses penghapusan
73	Lemari es	-	-	2	Dalam proses penghapusan
74	Kipas angin	-	-	18	Dalam proses penghapusan
75	Equalizer	-	-	1	Dalam proses penghapusan
76	Sound System	-	-	1	Dalam proses penghapusan
77	Microphone	-	-	2	Dalam proses penghapusan
78	Microphone table stand	-	-	6	Dalam proses penghapusan
79	Stabilisator	-	-	3	Dalam proses

					penghapusan
80	Lambang Garuda Indonesia	-	-	3	Dalam proses penghapusan
81	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	-	1	Dalam proses penghapusan
82	Pataka	-	-	5	Dalam proses penghapusan
83	Dispenser	-	-	5	Dalam proses penghapusan
84	Mimbar/Podium	-	-	2	Dalam proses penghapusan
85	Gordyn/kray	-	-	9	Dalam proses penghapusan
86	Kabel roll	-	-	9	Dalam proses penghapusan
87	Asbak tinggi	-	-	3	Dalam proses penghapusan
88	Keset kaki	-	-	6	Dalam proses penghapusan
89	Kabel	-	-	2	Dalam proses penghapusan
90	Camera digital	-	-	1	Dalam proses penghapusan
91	Key telephone	-	-	5	Dalam proses penghapusan
92	Pesawat telephone	-	-	12	Dalam proses penghapusan
93	Telephone mobile	-	-	2	Dalam proses penghapusan
94	Faximili	-	-	3	Dalam proses penghapusan
95	Antenna SHF Transportable	-	-	2	Dalam proses penghapusan
96	Peralatan antenna SHF	-	-	2	Dalam proses penghapusan
97	All band receiver	-	-	1	Dalam proses penghapusan
98	Alat pemadam kebakaran	-	-	1	Dalam proses penghapusan
99	Generator	-	-	2	Dalam proses penghapusan
100	Stabilizer	-	-	4	Dalam proses penghapusan
101	Internet	-	-	1	Dalam proses penghapusan
102	Hard disk	-	-	3	Dalam proses penghapusan
103	Rambu papan tambahan	-	-	1	Dalam proses penghapusan
104	Monografi	-	-	2	Dalam proses penghapusan
105	Software computer	-	-	1	Dalam proses penghapusan

1) Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang penetapan status BMN dan Perma Nomor: 1 Tahun 2017 tentang penetapan status BMN serta berdasar usulan penetapan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: W4-TUN4/928/um.03.10/1x/2017 tanggal 04 Februari 2017 SK penetapan status BMN atas Tanah dan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum ada.

2) Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Pengalihan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diusulkan untuk penghapusan BMN yang statusnya dalam keadaan rusak berat. Sedangkan BMN yang hilang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diselesaikan tuntutan ganti rugi (TGR).

d. Tata Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 24. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode Oktober Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Umum & Keuangan.	7	24
2	Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	23	48
3	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	7	14
4	Kepaniteraan Perkara.	13	16
5	Kepaniteraan Hukum.	4	2

1) Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan Oktober 2023 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Pengelolaan database secara elektronik belum

dilakukan melalui aplikasi **SLIM Senayan**, Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

- 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan
Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.
- 3) Pengelolaan Aset dan BMN

2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas menyelenggarakan program kepegawaian dalam arti penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penatausahaan, rumah tangga, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat dan kehadiran. Kepala Sub Bagian Kepegawaian ORTALA saat ini dilaksanakan oleh Analis Perkara Peradilan sebagai pelaksana tugas dari Panitera Muda Hukum Umum karena Pejabat sebelumnya telah purna bakti dan belum diangkatnya Kepala Sub Bagian yang baru, bagian ini juga tidak memiliki pelaksana tetapi dibantu oleh tenaga PPNPN.

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 25 Orang yang terdiri dari:

Tabel 25. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Jusak Sindar, S.H	
2.	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Donny Poja, S.H.	
5.	Hakim	Ratna Jaya, S.H	
6.	Panitera	Suyadi, S.H	
7.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
8.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
9.	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	
10.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
11.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
12.	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	
13.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	

14.	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	
15.	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	
16.	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., M.H	
17.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
18.	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Apriani Samuel, S.Psi	Bendahara Pengeluaran
19.	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen. M. F. Suli, A.Md. Kom	
20.	Jurusita Pengganti	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
22.	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	
23.	Analisis Perkara Peradilan	Lowrenszya Siagian, S.H	
24.	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	Plt. Kasub Kepegawaian & Ortala

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	JABATAN	NAMA	GOL
1	Ketua	Jusak Sindar, S.H	IV/b
2	Wakil Ketua	Merna Cinthia, S.H., M.H	IV/b
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/b
4	Hakim	Ratna Jaya, S.H	IV/a
5	Hakim	Donny Poja, S.H.	III/d
6	Panitera	Suyadi, S.H	IV/a
7	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	IV/a
8	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
9	Panitera Muda Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
10	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	III/d
11	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	III/b
12	Panitera pengganti	Elizabeth Kaikatuy, S.H	III/b
13	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	III/d
14	Panitera Pengganti	Komarudin, S.H	III/b
15	Panitera Pengganti	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	III/b

16	Juru Sita Pengganti	Meice Tjandra, S.E., S.H., S.H	III/c
17	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	IV/a
18	Analisis SDM Aparatur	Apriani Samuel, S.Psi	III/b
19	Analisis Perkara Peradilan	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	III/b
20	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
21	Analisis Perkara Peradilan	Lowrenszya Siagian, S.H	III/a
22	Analisis Perkara Peradilan	Fitri Yulyanti, S.H	III/c
23	Pengelola Keuangan Perkara	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/d
24	Pengelola Barang Milik Negara	Dedy Widya Nugraha, A.Md	III/a

1. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 27. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN ADMINISTRASI LAINNYA
1	Komarudin, S.H	Panitera Pengganti.	Kasir
2	Christine M. Rohrohmana, S.H	Jurusita Pengganti	Petugas Meja I dan Bendahara Penerimaan
3	Apriani Samuel, S.Psi	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama.	Operator SAIBA
5	Dedy Widya Nugraha, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	Pembuat Daftar Gaji BMN
6	Rafika, S.Pt	Kepala Sub Bagian PTIP	Pejabat Penandatangan SPM

Tabel 28. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan.	Pengemudi
2.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Pramubakti
3.	Esti Sitinjak, S.Kom.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti
4.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.	Pramubakti

5.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pramubakti
6.	Izak Pattipeilohy.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan.	Satpam
7.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Perkara.	Pengemudi
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panitera Muda Hukum.	Satpam
9.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti
10.	Hose Pondan Mangallo, S.E	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan.	Pramubakti

2. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan November mendapat promosi/mutasi dan tidak terdapat pejabat atau pegawai yang pensiun.

3. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Tidak terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan November mengikuti Diklat maupun Bimtek.

Tabel 29. Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan November Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT/BIMTEK	PELAKSANA
1,	Ratna Jaya, S.H	HAKIM	Pelatihan Singkat Sengketa Administrasi Perkara secara Elektronik (E-Litigasi) bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara se Indonesia	Pusdiklat Teknis Peradilan
2.	Donny Poja, S.H	HAKIM	Pelatihan Singkat Sengketa Administrasi Perkara secara Elektronik (E-Litigasi) bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara se Indonesia	Pusdiklat Teknis Peradilan

4. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh Fefi Yanti Thomas, S.E sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun,

serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh Fefi Yanti Thomas, S.E sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	KETERANGAN
1	Jusak Sindar, S.H	Lengkap	-
2	Merna Cinthia, S.H., M.H	Lengkap	-
3	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
4	Donny Poja, S.H.	Lengkap	-
5	Ratna Jaya, S.H	Lengkap	-
6	Suyadi, S.H.	Lengkap	-
7	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
8	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
9	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
10	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
11	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
12	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
13	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
14	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
15	Komarudin, SH	Lengkap	-
16	Meice Tjandra, S.E., S.H., M.H	Lengkap	-
17	Efraim Yoseph Patty, S.H., M.H	Lengkap	-
18	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-
19	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
20	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
21	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
22	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Lengkap	-
23	Lowrenszya Siagian, S.H	Lengkap	-
24	Fitri Yulyanti, S.H	Lengkap	-

3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Saat ini Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibantu oleh Pranata Komputer Ahli Pertama dan PPNP di bagian server.

3.1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan November Tahun 2023 tidak dilakukan revisi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Kode Satker 539138 maupun DIPA 05 Dirjen Badilmiltun Kode Satker 539139.

3.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung SK MA 1-144 tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari SK 144/2007 mengenai dasar pembuatan situs Mahkamah Agung. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP sesuai SK Nomor W4-TUN4/55/OT.01.3/1/2023 Pelaksana redaktur dan editor adalah Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 310 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 20 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 10 Mbps.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana berupa pagar kantor yang belum diselesaikan serta Pelatihan sumber daya manusia ditingkatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman lebih baik kedepan.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang bahkan tidak ada pegawai pada bagian Umum Keuangan dan bagian Kepegawaian Ortala.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya pembangunan pagar tahap kedua yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 15 Desember 2023

KETUA

JUSAK SINDAR

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBPA DIPA 005.05

Lampiran 6 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN NOVEMBER 2023

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA JAYAPURA (539138)
PROPINSI : PAPUA (2500)

BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)

UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022

NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-1 TANGGAL 14 APRIL 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-3

: TANGGAL 01 SEPTEMBER 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-4 TANGGAL 23 OKTOBER 2023, SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 REVISI KE-5 TANGGAL 22 NOVEMBER 2023

NO	KODE	JENIS BELANJA/IAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET	
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(8*7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13	
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
	1080	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi											
	1086.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL											
	1086.EBA.002	Layanan Umum											
051		Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah											
A. 521252		Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	2.296.000	1.980.000	86.24%	0	0.00%	1.980.000	86.24%	316.000	13.76%		
051		Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah											
B. 521252		Alat bantu jalan	1.000.000	1.000.000	100.00%	0	0.00%	1.000.000	100.00%	0	0.00%		
		JUMLAH KEGIATAN 1086.EAC.003	3.296.000	2.980.000	90.41%	0	0.00%	2.980.000	90.41%	316.000	9.59%		
	1086.EBA.004	LAYANAN PERKANTORAN											
001		Gaji dan Tunjangan											
A. 511111		Belanja Gaji Pokok PNS	1.240.455.000	1.025.399.540	82.27%	87.496.900	7.02%	1.112.896.440	88.28%	133.558.560	10.72%		
511119		Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	17.578	76.43%	1.434	5.23%	19.012	82.66%	3.988	17.34%		
511121		Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	99.032.000	73.047.840	73.76%	5.891.650	5.95%	78.939.790	79.71%	20.092.210	20.29%		
511122		Belanja Tunj. Anak PNS	30.375.000	23.549.256	77.53%	2.079.028	6.84%	25.628.284	84.37%	4.746.716	15.63%		
511123		Belanja Tunj. Suku/raja PNS	32.760.000	25.380.000	77.47%	1.800.000	5.49%	27.180.000	82.87%	5.580.000	17.03%		
511124		Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.485.850.000	1.189.445.050	80.05%	96.260.000	6.48%	1.285.695.050	86.53%	200.154.950	13.47%		
511125		Belanja Tunj. PPh PNS	258.378.000	195.887.868	75.81%	14.389.506	5.57%	210.277.374	81.38%	48.100.626	18.62%		
511126		Belanja Tunj. Beras PNS	73.579.000	56.415.180	76.67%	4.707.300	6.40%	61.122.480	83.07%	12.456.520	16.93%		
511129		Belanja Uang Makan PNS	228.664.000	144.892.000	63.36%	17.182.000	7.51%	162.074.000	70.88%	66.590.000	29.12%		
511138		Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	209.970.000	163.045.000	77.65%	16.650.000	7.93%	179.695.000	85.56%	30.275.000	14.42%		
511151		Belanja Tunjangan Umum PNS	19.355.000	14.000.000	72.33%	1.115.000	5.76%	15.115.000	78.09%	4.240.000	21.91%		
511157		Belanja Tunjangan Kemahalaan Hakim	178.800.000	132.000.000	74.06%	12.000.000	6.79%	144.000.000	81.45%	32.800.000	18.55%		
		JUMLAH KEGIATAN 1086.EAA.001	3.861.241.000	3.043.079.312	78.81%	259.563.118	6.72%	3.302.642.430	85.53%	558.598.570	14.47%		
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor											
A. 521111		Belanja Keperluan Perkantoran	598.178.000	491.194.070	82.12%	45.655.000	7.63%	536.849.070	89.75%	61.328.930	10.25%		
521611		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73.147.000	99.893.172	95.54%	1.437.000	1.96%	71.320.172	97.50%	1.926.828	2.50%		
B. 521111		Belanja Keperluan Perkantoran (Video Conference - Internet)	228.444.000	165.363.910	82.30%	19.578.700	8.65%	205.942.610	90.95%	20.501.390	9.05%		
521114		Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18.000.000	14.436.440	80.20%	641.600	3.56%	15.078.040	83.77%	2.921.960	16.23%		

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(8-7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	522112	Belanja Langgananan Telepon	4.524.000	3.693.622	81,65%	360.698	7,97%	4.054.320	89,62%	469.680	10,38%	
	522113	Belanja Langgananan Air	1.104.000	672.000	51,81%	56.000	5,07%	828.000	56,88%	476.000	43,12%	
	522141	Belanja Sewa (Web Hosling)	5.100.000	5.016.173	98,36%		0,00%	5.016.173	98,36%	83.827	1,64%	
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	523.139.000	488.638.000	95,32%	24.500.000	4,68%	523.138.000	100,00%	3.000	0,00%	
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	56.020.000	55.990.257	99,98%		0,00%	55.990.257	99,99%	59.743	0,11%	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	207.724.000	150.622.020	72,51%	23.332.279	11,23%	173.954.299	83,74%	33.769.701	16,26%	
	D. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas)	34.152.000	34.000.000	99,55%		0,00%	34.000.000	99,55%	152.000	0,45%	
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80.604.000	58.689.000	72,81%	7.448.470	9,35%	58.689.000	72,81%	21.915.000	27,19%	
	H. 524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109.080.000	60.471.164	55,44%		0,00%	60.471.164	55,44%	41.180.368	37,73%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.002	1.837.214.000	1.629.837.828	88,12%	123.009.747	6,35%	1.752.847.575	80,47%	184.666.425	9,53%	
	1071	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG										
	1071.EBB.961	LAYANAN SARANA INTERNAL										
	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran										
	A. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Kursi Roda)	4.000.000	4.000.000	100,00%		0,00%	4.000.000	100,00%	0	0,00%	
	B. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Meubelair)	50.000.000	0	0,00%		0,00%	0	0,00%	50.000.000	100,00%	
	1071.EBB.971	LAYANAN PRASARANA INTERNAL										
	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan										
	A. 533121	Pengadaan Prasarana Disabilitas (Jalur/Toliet Disabilitas)	34.433.000	34.433.000	100,00%		0,00%	34.433.000	100,00%	0	0,00%	
	B. 533111	Pagar Kantor	1.000.000.000	100.758.000	10,08%	447.772.000	44,78%	548.531.000	54,85%	451.469.000	45,15%	
		JUMLAH KEGIATAN 1071.EAD.001	1.088.433.000	139.192.000	12,79%	447.772.000	41,14%	586.964.000	53,93%	501.469.000	46,07%	
		JUMLAH KESELURUHAN	8.890.184.000	4.814.789.140	54,16%	830.344.865	9,35%	5.645.134.005	63,50%	1.245.049.995	14,34%	

Jumlah Anggaran	8.890.184.000	Persentase
Realisasi Anggaran	5.645.134.005	63,50%
Sisa Anggaran	1.245.049.995	14,34%



LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN NOVEMBER 2023

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
 PROPINSI : PAPUA (2500)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
 NO. DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
 NO. DIPA/ TGL DIPA REVISI : SP DIPA- 005.01.2.539139/2023 REVISI KE-1 TANGGAL 14 APRIL 2023, SP DIPA- 005.01.2.539139/2023 REVISI KE-2 TANGGAL 12 JULI 2023

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(8+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	005.06.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.AEA	Koordinasi										
I	1059.AEA.003	Dukungan Penyelesaian Perkara										
	061	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521211	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	12.000.000	9.320.000	77.67%	1.680.000	13.33%	10.920.000	91.00%	1.080.000	9.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	12.000.000	9.320.000	77.67%	1.680.000	13.33%	10.920.000	91.00%	1.080.000	9.00%	
II	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	061	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK Posbakum)	4.100.000	2.736.700	66.75%	400.000	9.76%	3.136.700	76.50%	963.300	23.50%	
	A. 522131	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	28.800.000	21.600.000	75.00%	2.400.000	8.33%	24.000.000	83.33%	4.800.000	16.67%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	32.900.000	24.336.700	73.97%	2.800.000	8.51%	27.136.700	82.48%	5.763.300	17.52%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(3+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
III	1059.00A.001	Pekerja Peraditan Tata Usaha Negara yang di Selesaikan Melalui Pembobasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembobasan Biaya Perkara										
	A. 521211	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	400.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400.000	100.00%	
	521811	Alat Tulis Kantor	100.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100.000	100.00%	
	522451	Honorarium Untuk Ahli Penerjemah/Juru Bahasa untuk Perkara Tertentu	400.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	400.000	100.00%	
	524113	Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan	500.000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	500.000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.002	1,400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,400,000	100.00%	
		JUMLAH KESELURUHAN	46,300,000	33,656,700	72.69%	4,400,000	9.50%	38,056,700	82.20%	8,243,300	17.80%	

Jumlah Anggaran	46,300,000	Percentage
Realisasi Anggaran	38,056,700	82.20%
Sisa Anggaran	8,243,300	17.80%



LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

: 2023
 : November
 : SP DIPA- 005.01.2.539138/2023 / 30-11-2022
 : MAHKAMAH AGUNG
 : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19		Rp. 27.153.362	Rp. 25.005.800
		- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan			Rp. 27.153.362	Rp. 25.005.800
		JUMLAH I			Rp. 27.153.362	Rp. 25.005.800
		JUMLAH I s/d I				



Mengetahui
 Sekretaris
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 Firdi Yanti Thomas, SE
 NIP. 197907102006042002

Jayapura, 30 November 2023
 Bendahara Penerimaan
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROMANA, S.H.
 NIP. 198508172019032006

TAHUN : 2023
 BULAN : November
 NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA-005.01.2.539138/2023 / 30-11-2022
 DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 0	Rp. 22.858.238	Rp. 4.295.124	Rp. 27.153.362
JUMLAH I			Rp. 0	Rp. 22.858.238	Rp. 4.295.124	Rp. 27.153.362
JUMLAH I s/d I			Rp. 0	Rp. 22.858.238	Rp. 4.295.124	Rp. 27.153.362

Mengetahui
 Sekretaris
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jayapura, 30 November 2023
 Bendahara Penerimaan
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



[Handwritten Signature]

Peti Yanti Thomas, SE
 NIP. 197903102006042002

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA RDHROHMANA, S.H.
 NIP. 198508172019032006

LAMPIRAN 4
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

TAHUN : 2023
 BULAN : November
 NOMOR / TANGGAL DIPAT : DIPA-005.05.2.539139/2023 / 30-11-2022
 DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH DISETOR
1		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
425232		Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan				
		- Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	147	10	Rp. 1.470.000	Rp. 1.470.000
425233		Pendapatan Ongkos Perkara				
		- Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	2	200	Rp. 400.000	Rp. 400.000
		- Pendaftaran Gugatan/Permohonan	34	30	Rp. 1.020.000	Rp. 1.020.000
		- Pendaftaran Permohonan Eksekusi	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		- Pendaftaran Permohonan Banding	18	50	Rp. 900.000	Rp. 900.000
		- Pendaftaran Permohonan Kasasi	16	50	Rp. 800.000	Rp. 800.000
425239		Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya				
		- Surat Penyerahan Memori Banding	34	10	Rp. 340.000	Rp. 340.000
		- Surat Pemberitahuan Akta Kasasi	21	10	Rp. 210.000	Rp. 210.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	38	10	Rp. 380.000	Rp. 380.000
		- Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di luar Perkara	6	10	Rp. 60.000	Rp. 60.000
		- Bedaksi Putusan/Penetapan	60	10	Rp. 600.000	Rp. 600.000
		- Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	21	10	Rp. 210.000	Rp. 210.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi	12	10	Rp. 120.000	Rp. 120.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon PK	5	10	Rp. 50.000	Rp. 50.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon	44	10	Rp. 440.000	Rp. 440.000
		- Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	23	10	Rp. 230.000	Rp. 230.000
		- Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	6	10	Rp. 60.000	Rp. 60.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon PK	2	10	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi	19	10	Rp. 190.000	Rp. 190.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding	18	10	Rp. 180.000	Rp. 180.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	16	10	Rp. 160.000	Rp. 160.000
		- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	89	10	Rp. 890.000	Rp. 890.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Penggugat/ Pemohon	1	10	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	46	10	Rp. 460.000	Rp. 460.000
		- Surat Penyerahan Memori Kasasi	21	10	Rp. 210.000	Rp. 210.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding	31	10	Rp. 310.000	Rp. 310.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	43	10	Rp. 430.000	Rp. 430.000
		- Permohonan Pengawasan Eksekusi	3	25	Rp. 75.000	Rp. 75.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	24	10	Rp. 240.000	Rp. 240.000
		- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	7.855	500	Rp. 3.927.500	Rp. 3.927.500
		- Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	110	10	Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000
		- Sisa Uang Panjar Perkara yang lebih dari 6 bulan tidak diambil oleh pihak ketiga (Sisa Uang Panjar Biaya Perkara)	5	305	Rp. 4.348.000	Rp. 4.348.000
		- Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	16	10	Rp. 160.000	Rp. 160.000
		- Surat Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon	8	10	Rp. 80.000	Rp. 80.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Tergugat/ Termohon	4	10	Rp. 40.000	Rp. 40.000
JUMLAH I					Rp. 20.160.500	Rp. 20.160.500
JUMLAH I s/d I					Rp. 20.160.500	Rp. 20.160.500



Jayapura, 30 November 2023
 Bendahara Penerimaan
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA BOHROHMANA, S.H.
 NIP. 198508172019032006

TAHUN : 2023
BULAN : November
NOMOR / TANGGAL DIPA : DIPA- 005.05.2.539139/2023 / 30-11-2022
DEPARTEMEN / LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
PROVINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI
1		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (Legos) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	Rp. 0	Rp. 1.310.000	Rp. 160.000	Rp. 1.470.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 0	Rp. 2.820.000	Rp. 320.000	Rp. 3.140.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 0	Rp. 14.173.000	Rp. 1.377.500	Rp. 15.550.500
		JUMLAH I	Rp. 0	Rp. 18.303.000	Rp. 1.857.500	Rp. 20.160.500
		JUMLAH I s/d I	Rp. 0	Rp. 18.303.000	Rp. 1.857.500	Rp. 20.160.500

Mengetahui
Sekretaris

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Feryanti Thomas, SE

Jayapura, 30 November 2023
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA ROHROHMANA, S.H.

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2023

FORMULIR LI-11

FORMULIR U. 11																			
NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENERIMAAN	NAMA KETUA/PANITERA	DISKUSI		ACARA SINGKAT				ACARA BIASA/ACARA CEPAT				SISA AKHIR		KOMOR PERKARA BELUM DINUTASI	KETERANGAN		
				PANGGILAN	PENETAPAN	TERIMA PERLUN	TANGGAL	MAJELIS HAKIM & PP	DIMULAI	PUTUSAN	PERLUAN	TANGGAL	PERKINISAN	DIMULAI	PUTUSAN			BEKUTU	BEKUTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	06/11/2023/PTUN JPR	13-03-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	13-03-2023	B.C1 C3D0	28-03-2023	10-05-2023	02-11-2023	.	.	.	KETUA : JUSAK SINDAR SH WAKIL KETUA : MERNA CINTHIA, SH, MH HAKIM-HAKIM 1. YUSUP KLEMEH SH 2. RATHA JAYA, SH, MH 3. DONNY POJA, SH PANITERA / P PENGANTU 1. SUYADI, SH 2. ABERUDANTO 3. JERKA W. RISAKOTTA, SH, MH 4. PETRUS MITTING, SH 5. DAVID ALK MITTING SH 6. ELIZABETH KAKATUY, SH 7. EFRIM YOSEPH PATTY, S.H, MH 8. KOMARUDIN, S.H REKAPTILASI 1. Sisa Bulan Lalu : 13 2. Masuk Bulan ini : 3 3. Pulus : 0 Dinassal Calat 4. Sisa Bulan Ini : 10 5. Belum di bagi : 1 6. Belum di Putus : 10 7. Dalam Menunggu
2	16/02/2023/PTUN JPR	19-06-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	19-06-2023	B.C1 C3D0	03-07-2023	27-07-2023	16-11-2023	.	.	.	
3	16/02/2023/PTUN JPR	23-06-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	28-06-2023	A.C1 C3D2	11-07-2023	01-08-2023	17-11-2023	.	.	.	
4	21/02/2023/PTUN JPR	07-07-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	07-07-2023	A.C1 C3D0	17-07-2023	07-08-2023	28-11-2023	.	.	.	
5	22/02/2023/PTUN JPR	11-07-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	11-07-2023	B.C1 C3D2	26-07-2023	23-08-2023	29-11-2023	.	.	.	
6	23/02/2023/PTUN JPR	20-07-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	20-07-2023	B.C2 C3D1	31-07-2023	23-08-2023	.	.	23/07/2023	.	
7	24/02/2023/PTUN JPR	01-08-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	01-08-2023	B.C1 C3D0	09-08-2023	23-09-2023	.	.	.	.	
8	25/02/2023/PTUN JPR	25-08-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	11-08-2023	C1 C2 C3D7	20-08-2023	16-10-2023	.	.	.	23/07/2023	
9	26/02/2023/PTUN JPR	11-09-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	12-09-2023	C1 C2 C3D3	20-09-2023	11-10-2023	.	.	.	28/07/2023	
10	27/02/2023/PTUN JPR	19-09-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	20-09-2023	A.C1 C3D0	02-10-2023	19-10-2023	.	.	.	27/07/2023	
11	28/02/2023/PTUN JPR	21-09-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	21-09-2023	B.C1 C3D1	04-10-2023	19-11-2023	16-11-2023	.	.	.	
12	29/02/2023/PTUN JPR	24-10-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	01-11-2023	C2 C1 C3D5	07-11-2023	30-11-2023	.	.	.	26/07/2023	
13	30/02/2023/PTUN JPR	31-10-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	01-11-2023	A.C1 C3D7	08-11-2023	24-11-2023	.	.	.	30/07/2023	
14	31/02/2023/PTUN JPR	16-11-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	17-11-2023	A.C1 C3D1	24-11-2023	.	.	.	31/07/2023	.	
15	32/02/2023/PTUN JPR	23-11-2023	MD	27-11-2023	.	.	.	.	.	.	30-11-2023	A.C2 C3D0	.	.	.	32/07/2023	.	.	
15	33/02/2023/PTUN JPR	30-11-2023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Jayapura, 30 November 2023

PANITERA A.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYADI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
JUSAK SINDAR

LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2023

Formulir LJ - T2

NO	JENIS PERKARA	SISA BULAN LALU			PERKARA			PENGGUGAT			TERGUGAT		PERLAWANAN		PUTUSAN						SISA PERKARA BULAN INI			Permohonan			Terima Berkas			KET.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2																													
A	GUGATAN																													
1	Pertanahan	5	3	-	8	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kepegawaian	3	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Perijinan																													
4	Lingkungan Hidup	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa																													
6	Badan Hukum/Parpol																													
7	Kepala Desa dan Perangkat desa																													
8	Kepala Daerah																													
9	Proses Pemilihan Umum																													
10	Pergantian Anlar Waktu (PAW)																													
11	Ketenagakerjaan																													
12	Sengketa Informasi Publik/KIP																													
13	Pengadaan Tanah																													
14	Fiktif Positif																													
13	KIP																													
15	Penyalahgunaan Wewenang																													
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan																													
17	Tindakan Faktual																													
18	Merek																													
19	Lain - Lain	4	-	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	13	3	-	16	16	-	-	16	-	-	-	-	-	1	3	2	6	10	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

Jayapura, 30 November 2023

Mengetahui :

Kepala Negara, TUA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

[Signature]

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

[Signature]
SUYADI



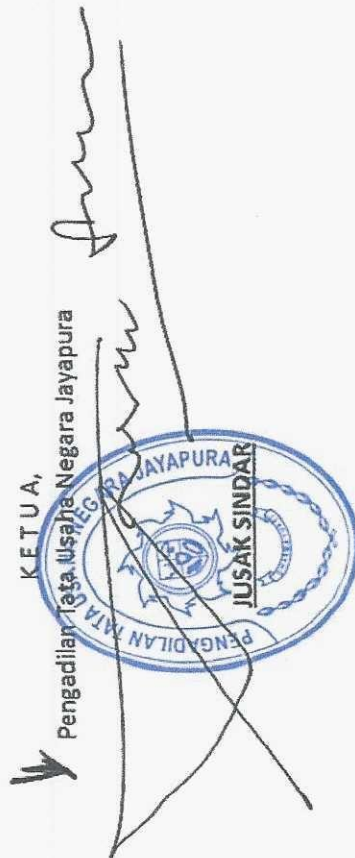
Formulir LI - T3

[illegible]

Jayapura, 30 November 2023

PANITERA,

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN NOVEMBER 2023

Formulir U - T4

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
1	-	03-11-2023	Hendrik Yan Tanem	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA JUSTICE & PEACE, YULYANTO SH.,MH. 0811488998, Jl. Jeruk Nipis Depan RS-POLRI Bhayangkara, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Pemohonan Ahli Waris	
2	-	13-11-2023	Thomas A Bano		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Tanah Adat dibangun Kantor PLN Tanpa Ada Izin Dari Masyarakat Yang Punya Tanah	
3	-	15-11-2023	Fiona Herlin De Fretes		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
4	-	16-11-2023	Maria Mata D Belo		Pemohon	Konsultasi Hukum Terkait Gugatan Ceraai Dari Suami Tom Darius Rumsowk	
5	-	20-11-2023	Beni Hese gem		Pemohon	Konsultasi Terkait Pilkada	
6	-	22-11-2023	Turan Tengko		Pemohon	Konsultasi Terkait Pertanahan	
7	-	23-11-2023	Delia Yarisitow		Pemohon	Konsultasi Terkait Penambahan Marga	
8	-	24-11-2023	Mariana Karobaba		Pemohon	Konsultasi Terkait Pemohonan Ahli Waris	
9	-	29-11-2023	Labuan Hurabarat		Pemohon	Konsultasi Terkait Kepegawaian	
10	-	29-11-2023	Yoob Ginia		Pemohon	Konsultasi Terkait Kredit Bank Papua Sudah Lunas Tapi Belum Di ksh Sertifikat Jaminannya	
11	-	30-11-2023	Alfres Y K Mara		Pemohon	Konsultasi Perbaikan Nama Pada Akta Pencatatan Sipil	

Mengetahui :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
JUSAK SINDAR

Jayapura, 30 November 2023

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUKADI

Formulir L1-T5

[illegible]

Mengetahui :

~~KE TUA,~~

Pengadilan Tata Usaha negara Jayapura

TRANITERA.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

16-4705

Formulir LI - T6

[illegible]

Jayapura, 30 November 2023



PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

JUSAK SINDAR

**PERDAIRAN LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN OKTOBER TAHUN 2023**

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form :LI-T7

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	33,390,500	-	-	33,390,500
2	Penerimaan	-	37,896,000	-	37,896,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	250,000	250,000
4	Biaya Panggilan	-	-	97,000	97,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	459,000	459,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	35,000,000	35,000,000
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	758,000	758,000
8	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	-	-
9	Materai	-	-	20,000	20,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	160,000	160,000
	b. Redaksi	-	-	20,000	20,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	540,500	540,500
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	1,227,000	1,227,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
13	Biaya Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	33,390,500	37,896,000	38,531,500	32,755,000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	12,386,500	-	-	12,386,500
2	Penerimaan	-	250,000	-	250,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	410,000	410,000
	Jumlah	12,386,500	250,000	410,000	12.226.500

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	2,176,000	-	-	2,176,000
2	Penerimaan	-	500,000	-	500,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	50,000	50,000
3	Materai	-	-	-	-
4	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
5	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	-	-
6	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	10,000	10,000
7	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
8	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
9	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	2,176,000	500,000	60,000	2,616,000

MENGETAHUI :
KETUA
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



Jayapura, 31 Oktober 2023

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

SUYADI

**LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN NOVEMBER TAHUN 2023**

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form :LI-T7

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	32,831,000	-	-	32,831,000
2	Penerimaan	-	69,416,000	-	69,416,000
3	Alat Tulis Kantor	-	-	375,000	375,000
4	Biaya Panggilan	-	-	214,000	214,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	363,000	363,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	42,000,000	42,000,000
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	1,630,000	1,630,000
8	Biaya Pengiriman	-	-	-	-
9	Materai	-	-	80,000	80,000
10	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	290,000	290,000
	b. Redaksi	-	-	80,000	80,000
	c. PNBP Lain-lain	-	-	976,000	976,000
11	Pengembalian Sisa Panjar kepada Pihak	-	-	1,937,000	1,937,000
12	Pengembalian Sisa Panjar kepada Negara	-	-	-	-
13	Biaya Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	32,831,000	69,416,000	47,945,000	54,302,000

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	12.226.500	-	-	12.226.500
2	Penerimaan	-	375,000	-	375,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	3,726,000	3,726,000
	Jumlah	12.226.500	375,000	3,726,000	8,875,000

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	2,277,000	-	-	2,277,000
2	Penerimaan	-	-	-	-
3	Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
4	Materai	-	-	10,000	10,000
5	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
6	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	29,000	29,000
7	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	10,000	10,000
8	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
9	Pengumuman Media Cetak	-	-	-	-
10	Pengembalian Sisa Panjar	-	-	707,000	707,000
11	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	2,277,000	-	756,000	1,521,000

MENGETAHUI:

KETUA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



Jayapura, 30 November 2023

PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 1 dari 2
Page 1 of 2

Kepada Yth. / To :

**RPL 063 PTUN JAYAPURA PDT BIAYA
PERKARA**

JALAN RAYA SENTANI WAENA Rt.001/001,-,KOTA
JAYAPURA HERAM KOTA JAYAPURA

Tanggal Laporan : 01/12/23
Statement Date

Periode Transaksi : 01/11/23 - 30/11/23
Transaction Period

No. Rekening : 214201000003307
Account No

Unit Kerja : KCP WAENA
Business Unit

Nama Produk : Giro Tres.NotP
Product Name

Alamat Unit Kerja : WAENA
Business Unit Address
JAYAPURA

Valuta : IDR
Currency

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
02/11/23 11:51:51	BRIVA19845493231100001NBMBTIGOR GEMDITA BRIVA 19845493231100001NBMBTIGOR GEMDITA ESB:NBMB:0200200P:604131513867	8888075	0.00	151,500.00	22,490,400.00
02/11/23 19:43:36	BRIVA19845493231100002NBMBWILLIAM HALASH BRIVA 19845493231100002NBMBWILLIAM HALAS ESB:NBMB:0200200P:604351611153	8888496	0.00	151,500.00	22,641,900.00
06/11/23 12:02:05	BFST214201000003307ROMEON HABAR:BMRIIDJA 20231106BMRIIDJA01000225907208 ESB:BFST:0008N:20231106BRINIDJA110158179566 48	8888662	0.00	21,000,000.00	43,641,900.00
07/11/23 12:35:45	BFST214201000003307ROMEON HABAR:BMRIIDJA 20231107BMRIIDJA01000221734646 ESB:BFST:0008N:20231107BRINIDJA110158746643 21	8888648	0.00	21,000,000.00	64,641,900.00
07/11/23 15:03:07	YARIDUL A FANOLONG-BANK DANAMON-Outgoing	BRI0372	0.00	21,000,000.00	85,641,900.00
08/11/23 08:49:49	BRIVA19845493231100003NBMBAGUSTINUS SHMH BRIVA 19845493231100003NBMBAGUSTINUS SHM ESB:NBMB:0200200P:606669703584	8888515	0.00	40,500.00	85,682,400.00
10/11/23 09:14:36	BFST214201000003307AGUNG TRIHAR:BNINIDJA 20231110BNINIDJA01000287757861 ESB:BFST:0008N:20231110BRINIDJA110160161179 18	8888684	0.00	19,000.00	85,701,400.00
15/11/23 10:52:00	19845493231100004#000000005763#MP #TRFHM LN 19845493231100004MP 6032988931457829	0888234	0.00	620,000.00	86,321,400.00
15/11/23 11:00:12	ATMLTRPRM 00057075119845493231100005 TRF PRIMA FROM	0888937	0.00	620,000.00	86,941,400.00
15/11/23 21:22:48	ATMLTRPRM 00051610019845493231100006 TRF PRIMA FROM	0888174	0.00	620,000.00	87,561,400.00
16/11/23 10:49:53	BRIVA19845493231100007INDSTHOMAS PENBWA BRIVA 19845493231100007INDSTHOMAS PENBWA ESB:INDS:000CB00P:6580bc506d48	0446052	0.00	865,000.00	88,426,400.00

Created By BRISIM
12/01/2023 08:07:03 AM



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
16/11/23 17:59:54	BRIVA19845493231100008NBMBJUHARI BRIVA 19845493231100008NBMBJUHARI ESB:NBMB:0200200P:610190704955	8888234	0.00	54,500.00	88,480,900.00
16/11/23 18:58:54	19845493231100009#000000529209#ATM #TRFL TRF BERSAMA FROM HERIYANTO LA 214201000003307ATM 6032989910863944	0888763	0.00	470,000.00	88,950,900.00
16/11/23 19:06:53	19845493231100010#000000529245#ATM #TRFL TRF BERSAMA FROM HERIYANTO LA 214201000003307ATM 6032989910863944	0888756	0.00	54,500.00	89,005,400.00
17/11/23 08:30:46	ESB:INDS:0002A00W:45c5ab0a11e3	2142051	42,000,000.00	0.00	47,005,400.00
18/11/23 14:15:27	BRIVA19845493231100012NBMBYULIUS DOMINGG BRIVA 19845493231100012NBMBYULIUS DOMING ESB:NBMB:0200200P:610929855097	8888452	0.00	38,000.00	47,043,400.00
18/11/23 22:04:09	BFVA19845493231100013 BERNADUS :BMRIIDJA 20231118BMRIIDJA01000220558864 ESB:BFST:0008N:2023111858187463	8888687	0.00	38,000.00	47,081,400.00
22/11/23 10:06:36	NBMB ARI FRIADI TO RPL 063 PTUN JAYA ESB:NBMB:0001500F:612456512600	8888147	0.00	35,000.00	47,116,400.00
23/11/23 09:05:18	BFVA19845493231100014 IWAN KURN:BMRIIDJA 20231123BMRIIDJA01000225054517 ESB:BFST:0008N:2023112322871512	8888656	0.00	865,000.00	47,981,400.00
24/11/23 11:19:18	KorATMMP04:6032984904243460:231123:23121 KorTrfIssMPAqBRIBerBRI:00023121: ESB:T:0391891:S:0391892:ATMMerahPutih	0391891	0.00	865,000.00	48,846,400.00
29/11/23 11:25:05	BFVA19845493231100016 NASKEL TH:BMRIIDJA 20231129BMRIIDJA01000225263158 ESB:BFST:0008N:2023112940403639	8888654	0.00	865,000.00	49,711,400.00
30/11/23 06:46:17	BFVA19845493231100015 YULIYANTO:BNINIDJA 20231130BNINIDJA01000208904739 ESB:BFST:0008N:2023113009879996	0369891	0.00	43,500.00	49,754,900.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
22,338,900.00	42,000,000.00	69,416,000.00	49,754,900.00

Terbilang / In Words

EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH
FORTY NINE MILLION SEVEN HUNDRED FIFTY FOUR THOUSAND NINE HUNDRED RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

--	--

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

Created By BRISIM
12/01/2023 08:07:03 AM